

**PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
memenuhi Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

IRMA YANTI LUBIS

NPM : 1602110225



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Maret 2019

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IRMA YANTI LUBIS
NPM : 1602110225

Dengan judul:

**PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI ACEH.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Maret 2019

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

IRMA YANTI LUBIS
NPM: 1602110225

Dengan judul:

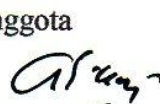
**PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 12 Maret 2019

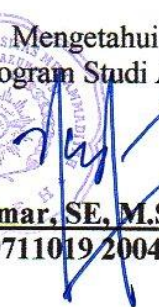
Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian


Ketua
Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001


Sekretaris
Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001


Anggota
Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19590217 199101 1 001


Anggota
Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001


Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Sosial Provinsi Aceh”**. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ayahnda Alm. Irsan Lubis dan Ibunda Maysitah serta keluarga tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapai cita citanya.
2. Bapak Drs, Tarmizi Gadeng, SE,M,Si,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar,SE,M,Si,Ak,CA. Selaku ketua Prodi Fakultas Ekonomi prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Syamsidar,SE,M,Si.Ak.CA dan Bapak Drs Tarmizi Gadeng, SE,M,Si.MM Selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan penelitian ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu serta mengajarkan penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah meridhainya. Amin.

Banda Aceh, 30 Januari 2019

Irma Yanti Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Akademis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1 Kinerja.....	8
2.1.1 Pengertian Kinerja	8
2.1.2 Aspek-Aspek Kinerja.....	9
2.1.3 Kinerja Keuangan	9
2.2 Pengawasan	10
2.2.1 Fungsi Pengawasan.....	11
2.2.2 Pengawasan Berdasarkan UU No 32 Tahun 2014.....	12
2.3 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	14
2.3.1 Pengertian Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	14
2.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan	15
2.4 Pengelolaan Keuangan.....	16
2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan.....	16
2.4.2 Azas Umum Dan Tujuan Pengelolaan Keuangan	17
2.4.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	18
2.5 Penelitian Sebelumnya.....	20
2.6 Kerangka Pemikiran	23
2.7 Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	26
3.1.2 Jenis Penelitian	26
3.1.3 Horizon Waktu.....	26
3.1.4 Unit Analisis	27
3.2 Populasi Dan Sampel	27
3.3 Sumber Teknik Pengumpulan data	28
3.4 Skala Pengukuran.....	29
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	32
3.7.1 Uji Validitas.....	32
3.7.2 Uji Reliabilitas	32

3.8	Uji Asumsi Klasik	33
3.8.1	Uji Normalitas	33
3.8.2	Uji Multikolinieritas	33
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	34
3.9	Pengujian Hipotesis	34
3.9.1	Uji F (Simultan)	34
3.9.2	Uji t (Parsial)	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Aceh	36
4.1.1	Visi dan Misi	38
4.1.2	Struktur Organisasi Dinas Sosil Provinsi Aceh.....	38
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	39
4.2.1	Karakteristik Responden	39
4.2.2	Analisis deskriptif	42
4.3	Hasil Pengujian Data	43
4.3.1	Pengujian Validitas	43
4.3.2	Pengujian Reliabilitas.....	44
4.4	Pengujian Asumsi Klasik	45
4.4.1	Uji Normalitas	45
4.4.2	Uji heterokesdatisitas	46
4.4.3	Uji Multikolinearitas	47
4.5	Pengujian Hipotesis	47
4.5.1	Uji F (Simultan)	47
4.5.2	Uji t (Parsial)	48
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.6.1	Pengaruh pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan	50
4.6.2	Pengaruh Pemahaman SAK Terhadap Kinerja Keuangan .	51
4.6.3	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan.....	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		55

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Penelitian Sebelumnya	22
Tabel	3.1	Skala Pengukuran.....	29
Tabel	3.2	Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel	4.1	Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel	4.2	Berdasarkan Usia	40
Tabel	4.3	Berdasarkan Status Perkawinan.....	40
Tabel	4.4	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel	4.5	Berdasarkan pendapatan Perbulan	41
Tabel	4.6	Statistik Deskriptif	42
Tabel	4.7	Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel	4.8	Hasil Uji Reliabilitas.....	44
Tabel	4.9	Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov	45
Tabel	4.10	Hasil Uji Multikolinearitas	47
Tabel	4.11	Hasil Uji F	48
Tabel	4.12	Hasil Uji determinasi	48
Tabel	4.13	Hasil uji t.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Pengujian Heterokesdatisitas	46

**PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH**

**IRMA YANTI LUBIS
NPM : 1602110225**

Pembimbing I : Syamsidar, SE,M,Si.Ak.CA
Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si.MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh. Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan Dinas Sosial Provinsi Aceh berjumlah 188 orang karyawan, teknik penarikan sampel menggunakan teknik slovin sehingga memperoleh 65 orang karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh. Pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0.808 atau 80,8% artinya kinerja keuangan memiliki hubungan kuat dengan pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,653 atau 65,3% artinya pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sebesar 65,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci : pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan.

Dinas Sosial Provinsi Aceh merupakan instansi yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan tidak menutup diri dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait pada kinerja, khususnya dalam merekrutmen dan seleksi calon pegawai. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh karyawan diperlukan calon karyawan yang memiliki kualifikasi yang tinggi maka diperlukan proses rekrutmen dan seleksi yang tepat, karena sistem rekrutmen dan seleksi akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan bekerja pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan akan memiliki prestasi kerja yang baik.

Suatu organisasi baik perusahaan maupun instansi dalam melakukan aktivitasnya sudah tentu memerlukan sumber daya manusia yang mendukung usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Bagaimana pun lengkap dan canggihnya sumber daya non manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan, tidaklah menjadi jaminan bagi instansi tersebut untuk mencapai suatu keberhasilan. Jaminan untuk dapat berhasil, lebih banyak ditentukan oleh sumber daya manusia yang mengelola, mengendalikan, dan mendayagunakan sumber-sumber daya non

manusia yang dimiliki. Kenyataan sering ditemukan bahwa dalam keadaan syarat kerja sudah terpenuhi, kinerja keuangan dirasakan masih terlalu rendah. Bahkan selalu mencari alasan bahwa kinerja keuangan yang rendah karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki instansi atau ketidakpuasan pegawai.

Kinerja individu dapat dilihat dari hasil kerja yang dicapai individu tersebut dalam melaksanakan tugas yang dibebankan atas dasar kecukupan, pengalaman, serta ketrampilan yang digunakan oleh individu dalam menghasilkan suatu pekerjaan. Kinerja keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Permasalahan yang terjadi pada Dinas Sosial Provinsi Aceh adalah kelemahan dalam sistem pengawasan yang diakibatkan karena satuan pengawasan yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal yang ada pada entitas dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. Ini mengakibatkan terjadi kelemahan dalam sistem pengawasan akuntansi dan pelaporan yang terjadi karena pengelolaan keuangan yang belum baik, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Pemahaman sistem akuntansi merupakan hal yang perlu dicermati karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah. menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi

akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh bahwa pengawasan yang masih rendah dan juga sering melakukan kegiatan atau program yang kurang inovatif dalam bekerja seperti tidak tepat dalam pembuatan dan pengiriman laporan, imbalan atau penghargaan yang belum sesuai dengan harapan, kondisi kerja yang kurang memadai. Maka dari itu setiap instansi perlu mempertimbangkan kinerja agar mampu meningkatkan keterampilan dan pelatihan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Mengingat betapa pentingnya pengawasan, sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan dalam upaya peningkatan kinerja, diharapkan dengan adanya pengawasan, sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif, maka dapat berdampak pada perkembangan Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh kedepannya untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh karyawan atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan.

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan telah dipatuhi, pengawasan sangat erat hubungannya

dengan perencanaan, dimana tanpa adanya perencanaan sebagai pedoman, maka pengawasan akan sangat sulit dilaksanakan, begitu juga sebaliknya, perencanaan tanpa pengawasan akan cenderung menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan tujuan, sehingga hal ini selalu mendapat perhatian khusus dalam setiap kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dapat terwujud atau setidaknya mendekati sasaran yang diinginkan.

Setelah dilakukan pengawasan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh oleh pengawasan berwenang maka untuk mendukung keberhasilan, agar pengawasan dapat berfungsi secara efektif. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Menurut Saefullah (2014:12) pengawasan merupakan suatu tindakan yang menjadi alat dalam pencapaian kinerja, apabila pengawasan intern telah tercapai sesuai yang diharapkan maka mendukung tercapainya kinerja pemerintah daerah yang diharapkan.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi agar dapat ditelusuri dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, instansi ini perlu memiliki sistem akuntansi keuangan yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja itu sendiri agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan transaksi keuangan.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Sosial Aceh perlu membuat suatu laporan

hasil keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pemerintah daerah. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Didalam pelaksanaan Otonomi Daerah perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.
2. Apakah pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.
3. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.
4. Apakah pengelolaan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Menambah bukti praktis mengenai pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada dinas sosial Provinsi Aceh.
2. Dengan diketahuinya perkembangan tingkat pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada dinas sosial Provinsi Aceh.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Dapat menambah literatur mengenai analisis tentang pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada dinas sosial Provinsi Aceh.
2. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pegawai Dinas Sosial Provinsi Aceh. Sesuai dengan masalah dikaji, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi mengenai masalah Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut wirawan (2013:260) kinerja merupakan hasil kerja seorang atau sebuah proses manajemen secara keseluruhan, dimana hasil kerja seorang tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur.

Mangkunegara (2010:65) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Bastian (2007:273) berpendapat bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Sutrisno (2013:172) kinerja adalah sebagai hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja dan kerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Selanjutnya Fahmi (2011:2) berpendapat bahwa Kinerja didefinisikan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

2.1.2 Aspek-Aspek Kinerja

Menurut Hasibuan (2013:94) mengungkapkan bahwa kinerja adalah gabungan tiga aspek penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi pekerja. Apabila kinerja tiap individu atau kelompok baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula.

Sedangkan menurut Rivai (2013:214) bahwa aspek-aspek kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kemampuan teknis, kemampuan menggunakan pengetahuan metode, teknik dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan latihan.
2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak di unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi serta tanggung jawab pegawai.
3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memotivasi pegawai lainnya.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Menurut Mathis (2013:78) yang menjadi indikator dalam mengukur kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi normal
2. Kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian ketelitian dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan.
3. Pemanfaatan waktu, yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan atau lembaga pemerintahan.
4. Kerjasama, yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain dalam pekerjaan.
5. Kehadiran, yaitu kedisiplinan dalam mematuhi tingkat absensi yang telah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

2.2 Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian(*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Mathis dan Jackson (2013: 303) menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Sedangkan Harahap (2013:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Kemudian menurut Fahmi (2012:61) pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Penyusunan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan mengadakan tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

2.2.1 Fungsi Pengawasan

Menurut Trisnawati dan Saefullah (2014:15) fungsi pengawasan yaitu:

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

2.2.2 Pengawasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014

Pengawasan yang dianut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 meliputi dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai

bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemerintah melakukan dua cara sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah, yaitu terhadap rancangan pengaturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Reperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Reperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota, untuk memperoleh klarifikasi, terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal dengan tiga bentuk pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota atau kepala daerah sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.
2. Pengawasan preventif dilakukan terhadap suatu rancangan peraturan daerah atau sebelum suatu peraturan daerah disahkan dan berlaku. Secara normatif pengawasan preventif dalam UU no. 5/1974 lebih baik dari pengawasan preventif yang diatur dalam UU no. 32/2004. Hal ini disebabkan karena dalam UU no. 5/1974 sanksi yang diatur lebih tegas dibanding UU no. 32/2004 yang tidak mengatur tentang sanksi dari pengawasan preventif. Sedangkan penghapusan pengawasan preventif terhadap perda dalam UU no. 22/1999 menjadi sebab terjadinya kekacauan dalam perda.
3. Pengawasan represif merupakan suatu paksaan pemerintah terhadap daerah dalam rangka menjaga keselarasan antara otonomi daerah dengan sistem Negara kesatuan yang dianut Indonesia serta menjaga rasa keadilan masyarakat. Secara normatif terdapat kekurangan dalam rumusan pengawasan represif menurut UU no. 5/1974. Kekurangan ini terletak dalam bentuk sanksi yang berupa penangguhan terhadap berlakunya perda. Hal ini kurang tepat karena penangguhan lebih sesuai bila dimasukkan ke dalam salah satu bentuk sanksi pengawasan preventif Sedangkan pengawasan represif dalam UU no. 22/1999 dan UU no. 32/2004 lebih baik daripada UU no. 5/1974.

2.3 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

2.3.1 Pengertian Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005). Penerapan Otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah

berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah (PP No.105/2000). Pasal 4 angka 2 PP No.58/2005 juga menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Mulyadi (2014:3) Sistem akuntansi keuangan adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan instansi. Sedangkan Darise (2013:41) Sistem akuntansi keuangan adalah serangkaian proses atau prosedur yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian Baridwan (2012:4) sistem akuntansi keuangan adalah suatu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik untuk laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dari pihak lainnya.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi.

2.3.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan

Penyusunan sistem akuntansi keuangan untuk suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus di pertimbangkan dengan baik. Menurut Mulyadi (2014:19) tujuan umum pengembangan sistem akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, mengenai mutu, ketetapan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*Reliability*) informasi akuntansi dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Adapun tujuan dari sistem akuntansi keuangan menurut Darise (2013:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah:

1. Pertanggungjawaban, memberikan informasi keuangan yang lengkap
2. Manajerial akuntansi keuangan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian anggaran.
3. Pengawasan akuntansi keuangan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.4 Pengelolaan Keuangan

2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut Adisasmita (2011:22) pengelolaan keuangan merupakan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat di nilai uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”

Menurut peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 6 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatalaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatalaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Menurut Halim (2013:137) pengelolaan keuangan adalah terdiri atas pengurusan umum dan pengrusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD), sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen.

2.4.2 Azaz Umum Dan Tujuan Pengelolaan Keuangan

Adapun azaz umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 peraturan pemerintah no 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan menurut Halim (2013:84) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Tanggung jawab
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna dan kegiatan bunga

2.4.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul (2012:99) Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Kemudian menurut Mardiasmo (2012: 121) Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Menurut Halim (2012:115) Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama lainnya adalah faktor kapital, yang biasa disebut sumber daya modal atau *capital resources*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal, yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Dasar atau acuan yang berisi teori atau temuan-temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Seperti penelitian yang pernah diteliti oleh:

Nugroho (2013) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Surakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Yusmalizar (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan Halomoan (2014) meneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Hasil penelitiannya menunjukkan Pengelolaan

keuangan daerah di Kota Jayapura kurang efektif. Ada dua indikator yang dapat membuktikan hal tersebut. Pertama, penyusunan rencana pendapatan daerah ditetapkan dengan kurang perencanaan dan tanpa data potensi, sehingga rencana pendapatan cenderung *underestimated* yang berdampak besar terhadap pengalokasian penggunaan anggaran yang kurang sesuai dan terjadinya *idlefund*. Kedua, dari sisi pengeluaran atau belanja menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah daerah, mulai dari proses penyusunan sampai pelaksanaan anggaran.

Kemudian Mukmin (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

Kemudian penelitian dilakukan oleh Rahmat (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan Fadjar (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 1 diterima. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 2 diterima. Adapun penelitiannya dapat di lihat secara rinci pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Nugroho (2013)	Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Surakarta	pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan	Tempat dan lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Surakarta
	Yusma Lizar (2014)	Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat)	pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tempat dan lokasi penelitian pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat
	Halomoan (2014)	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus.	1. Pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura kurang efektif. Ada dua indikator yang dapat membuktikan hal tersebut. 2. penyusunan rencana pendapatan daerah ditetapkan dengan kurang perencanaan dan tanpa data potensi, sehingga rencana pendapatan cenderung <i>underestimated</i> yang berdampak besar terhadap pengalokasian penggunaan anggaran yang kurang sesuai dan	Melakukan penelitian pada jenis objek yang sama yaitu Pengelolaan Keuangan	Peneliti melakukan penelitian pada variabel yang berbeda yaitu variabel pengawasan, pemahaman system akuntansi

			terjadinya <i>idlefund</i> . Kedua, dari sisi pengeluaran atau belanja menunjukkan kurangnya kesiapan pemerintah daerah, mulai dari proses penyusunan sampai pelaksanaan anggaran.		keuangan
--	--	--	--	--	----------

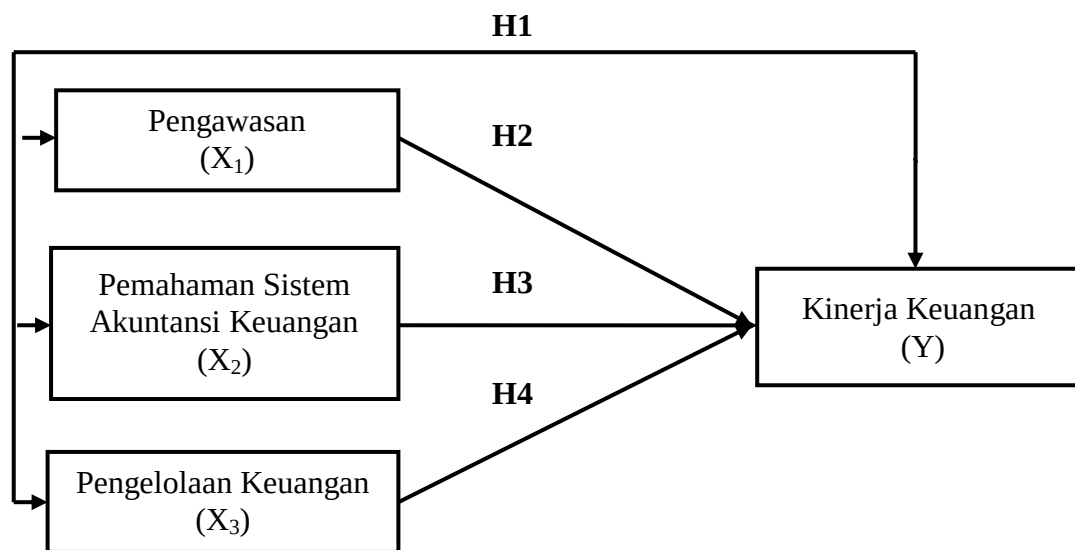
Tabel 2.1

Lanjutan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Mukmin (2015)	Pengaruh Pemahaman System Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah kabupaten Aceh Timur	bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.	Melakukan penelitian pada variable yang sama yaitu Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Melakukan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Dan objek Penatausahaan Keuangan dan melakukan penelitian pada variabel pengelolaan barang milik daerah
	Rahmat (2015)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	pengelolaan keuangan daerah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	Melakukan penelitian pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten padang pariaman
	Fadjar (2017)	Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten	pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 1 diterima. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, berarti hipotesis 2 diterima.	Sama-sama melakukan penelitian pada objek yang sama yaitu Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan	Melakukan penelitian pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar dengan objek penelitian variabel yang berbeda

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2014:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Secara skematis, kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan baik secara simultan maupun parsial. Pengujian secara simultan dilakukan menggunakan uji F dan pengujian secara parsial menggunakan uji t.

2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64) hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.
- H₂: Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.
- H₃: Pemahaman sistem akuntansi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.
- H₄: Pengelolaan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang beralamat di jalan sultan Iskandar Muda No.49 Banda Aceh, Aceh. Adapun objek penelitiannya adalah pegawai pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka dan perhitungan menggunakan metode statistik. Menurut Sugiyono (2014:14) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau kualitatif yang berbentuk angka. Tujuan untuk mengkonfirmasi konsep dan teori dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan.

1.1.3 Horizon Waktu

Penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai survei awal pada objek penelitian sehingga penyebaran kuesioner. Waktu penelitian ini di mulai sejak April 2018 berakhir hingga penelitian ini selesai.

1.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Oleh karena itu unit analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

1.2 Populasi Dan Sampel

Menurut Notoatmodjo (2012:115) Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Sosial Provinsi Aceh berjumlah 188 orang pegawai. Sampel penelitian adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *slovin*. Rumus sederhana dalam menentukan sampel dijelaskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persentase Kesalahan Pengambilan Sampel 10%.

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas, maka ukuran sampel dapat di lihat sebagai berikut:

$$n = \frac{188}{1 + 188 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{188}{1 + 188 (0,01)}$$

$$n = \frac{188}{1 + 1,88}$$

$$= \frac{188}{2,88}$$

= 65,28 Dibulatkan menjadi 65 orang.

Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 orang karyawan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh, dimana penarikan sampel dilakukan dengan metode *Slovin*.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Menurut Arikunto (2013:265) menyusun instrumen adalah pekerjaan yang penting dalam penelitian akan tetapi mengumpulkan data yang lebih penting. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan) adalah teknik pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Aceh, kemudian dilakukan pencatatan.
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat semua arsip dan catatan penting yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

3.4 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2014:93) Skala pengukuran persepsi responden menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini untuk memudahkan responden dalam menjawab kuesioner, maka skala penelitiannya dapat di lihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak setuju (STS)	1
2	Tidak setuju (TS)	2
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Sugiyono (2014:93)

1.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2014:58) operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi indikator, skala dan item dari masing-masing pernyataan yang mewakili indikator kinerja pegawai, kompensasi dan kepuasan kerja dari masing-masing variabel dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Ukuran	Referensi	Item
Dependent						
1.	Kinerja (Y)	kinerja keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya system pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.	- Kuantitas laporan keuangan - Kualitas Kerja - Pemanfaatan anggaran - Kemampuan - Kinerja pemerintah	5-1	Halim (2012:115)	1-5
Independent						
2	Pengawasan (X ₁)	Pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala	- Fungsi dan Tujuan - Pengawasan Adaptasi lingkungan - Meminimalkan biaya	3-1	Harahap (2013:14)	1-5

		aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.				
3	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X_2)	Sistem akuntansi keuangan adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan instansi.	- Pencatatan - Penggolongan dan peringkasan transaksi - Pelaporan keuangan	3-1	Mulyadi (2014:3)	1-3
4	Pengelolaan Keuangan (X_3)	pengelolaan keuangan merupakan bukan hanya melaksanakan suatu Kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.	- Pelaksanaan - Perencanaan - Penatausahaan - Pelaporan - pertanggungjawaban	5-1	Adisasmita (2011:22)	1-5

1.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan regresi linear berganda untuk analisis pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ini dipilih karena penelitian ini di rancang untuk

menentukan variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

X₁ = Pengawasan

X₂ = Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

X₃ = Pengelolaan Keuangan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = *Error Torn*

3.7 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2013:168) uji validitas atas suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Alat ukur validitas adalah *Korelasi Product Momen*. Sedangkan Menurut Sugiyono (2014:121) uji validitas adalah hasil penelitian yang valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Suatu indikator dikatakan valid apabila $n = 65$ dan $\alpha = 0,05$, maka $r_{\text{tabel}} = 0,240$ dengan ketentuan hasil $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} (0,240)$ valid dan hasil $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}} (0,240)$ tidak valid.

1.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2013:145) untuk uji reliabilitas digunakan teknik *Cronbach Alpha*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (*Reliabel*) bila memiliki koefisien keandalan atau *Alpha* sebesar 0,60 atau lebih. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:121) uji reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Setelah instrumen di uji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Alat untuk menguji reliabilitas adalah *Alpha Cronbach*. Suatu variabel dikatakan reliabilitas apabila hasil $\alpha > 0,60 = \text{Reliable}$ dan apabila hasil $\alpha < 0,60 = \text{tidak Reliable}$.

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2011:84) Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas, dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi dengan normal atau tidak. Penulis melakukan uji normalitas data dengan uji grafik *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusinya data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.8.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2011:63) Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance*

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 90% maka VIF-nya di atas 10 maka dapat dikatakan bahwa model tersebut terkena multikolinieritas

1.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi ketiga adalah heteroskedastisitas (*heteroscedasticity*). Menurut Ghozali (2011:86) uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam hal ini akan dilakukan dengan cara melihat grafik *Scatterplot*. Jikadalam grafik terlihat ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji F (Simultan)

Pengujian dengan uji F adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada probabilitas 0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas

Sosial Provinsi Aceh. Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.

3.9.2 Uji t (Parsial)

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikan 0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Aceh

Pada tahun 1951 mengalami penggabungan dengan daerah Sumatra Utara dan Tengah, di mana cabang dari Kabupaten dapat berhubungan langsung dengan Kantor Departemen Sosial Medan. Pada tahun 1956 instansi ini dibentuk lagi dan berkedudukan di Kota Raja (Sekarang Banda Aceh) dengan nama Jawatan Pekerjaan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipimpin oleh Prof. Ali Hasyimi. dengan adanya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1958, tentang penyerahan tugas lapangan, bimbingan dan perbaikan pada daerah tingkat I telah melaksanakan tingkat Peraturan Pemerintah (PP) serata telah menerima penyerahan sebagai mana tugas-tugas yang dimaksud. Maka untuk melaksanakannya pada akhir tahun 1958 dibentuklah Dinas Sosial Daerah Istimewa Aceh. Seiring penyerahan tugas-tugas tersebut yang diserahkan oleh pusat, maka pada tahun 1962 dibentuk Kantor Perwakilan Departemen Sosial Daerah Istimewa Aceh dibawah Pimpinan Bapak Usman Ibrahim yang tidak mempunyai cabang di Kabupaten.

Untuk menghindari dualisme yang berkepanjangan serta kompetisi yang kurang menguntungkan dalam kerjanya kedua instansi Sosial tingkat I tersebut, maka Departemen Sosial dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menyetujui pengangkatan seorang pimpinan untuk memimpin kedua Instansi Sosial tersebut menjadi satu. Sebagai konsekuensinya dan tidak lanjut instansi tersebut telah bersedia menerima sebahgian tugas-tugas sosial menjadi urusan rumah tangga Pemerintah daerah. dengan keputusan surat Gubernur kepada daerah Istimewa

Aceh Nomor 49/III/KPTS/1969, Tanggal 24 Maret 1969 diterapkan instruktur organisasi susunan tugas dari tugas pada Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pembagian seperti tersebut tidak langsung lama karna sebagian pelaksanaan KEPRES Nomor 44-45 tahun 1975 yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata laksana departemen Sosial. Nama Kantor Perwakilan Departemen Sosial dirubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dipimpin oleh Bapak Drs. R. Soedarno, seterusnya berturut-turut sebagai nama yang sama:

1. Tahun 1978 dipimpin oleh Bapak Drs. Mappalelu Lebu
2. Tahun 1984 dipimpin oleh Bapak Drs. R. Suhud Pribadi.
3. Tahun 1986 dipimpin oleh Bapak Kol. Drs. Azwar Syahbuddin.
4. Tahun 1987 dipimpin oleh Bapak Kol. Drs. A. H. Ismail.
5. Tahun 1990 dipimpin oleh Hamid Jas, Dip. SPA, dan.
6. Tahun 1992 dipimpin oleh Drs. Saleh Yakub
7. Tahun 2000 dipimpin oleh Drs. Rusli Wahid, (kemudian Kanwil Sosial dileburkan dan bergabung dengan Dinas Provinsi Aceh tahun 2001 yang masih dipimpin oleh Drs. Rusli Wahid).
8. Tahun 2003 dipimpin oleh Drs. Zulkarnain Djakfar.
9. Tahun 2004 dipimpin oleh Drs. Sulaiman Daudi.
10. Tahun 2005 dipimpin oleh dr. Haniff Asmara M.Msc.
11. Tahun 2008 dipimpin oleh Drs. Ridwan Sulaiman.
12. Tahun 2012 dipimpin oleh drh. Muhammad Nasir Mahmud.
13. Tahun 2013 dipimpin oleh Abu Bakar, SH.
14. Tahun 2014 dipimpin oleh Bukhari, Aks, MM.

15. Tahun 2015 di Pimpin oleh Drs. Alhudri, MM sampai dengan sekarang

4.1.1 Visi dan Misi

Visi

1. Terwujudnya masyarakat aceh yang bermartabat dan kesejahteraan sosial

Misi

1. Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi PKMS.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh

Struktur organisasi merupakan salah satu cara untuk suatu langkah awal sebelum ada suatu kegiatan instansi untuk mencapai suatu tujuan instansi. Dengan adanya struktur organisasi maka pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Adapun struktur organisasi pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris
 - ❖ Sub Bagian Program
 - ❖ Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - ❖ Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - ❖ Seksi perlindungan Sosial Korban Bencana
 - ❖ Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - ❖ Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Bidang Rehabilitas Sosial
 - ❖ Seksi rehabilitas sosial anak dan lanjut usia
 - ❖ Seksi rehabilitas sosial penyandang disabilitas
 - ❖ Seksi rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
5. Bidang Pemberdayaan Sosial

- ❖ Seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga
 - ❖ Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan social
 - ❖ Seksi pemberdsayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- ❖ Seksi identifikasi dan penguatan kapasitas
 - ❖ Seksi pendampingan dan pemberdayaan
 - ❖ Seksi bantuan stimulant dan penataan lingkungan

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri karyawan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang terpilih sebagai sampel sebanyak 65 orang karyawan. Karyawan yang menggambarkan identitas mereka yang di lihat dari segi usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan pendapatan perbulan. Dapat di lihat sebagai berikut.

Tabel 4.1
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Karakteristik	Frekuensi (Karyawan)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	27	41,54 %
2	Perempuan	38	58,46 %
Total		65	100 %

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menjelaskan bahwa dari 65 orang karyawan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang di lihat dari jenis kelamin responden bahwa yang laki-laki sebanyak 27 orang karyawan atau 41,54 % dan perempuan sebanyak 38 orang karyawan atau 58,46 %.

Tabel 4.2
Berdasarkan Usia

No	Karakteristik	Frekuensi (Karyawan)	Persentase (%)
1	< 20 Tahun	8	12,31 %
2	21 – 30 Tahun	21	32,31 %
3	31 – 40 Tahun	13	20 %
4	41 – 50 Tahun	14	21,54 %
5	> 51 Tahun	9	13,84 %
Total		65	100 %

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas bahwa dari 65 orang karyawan pada Dinas Pendidikan Sosial Provinsi Aceh yang dilihat dari usia bahwa yang berusia < 20 tahun sebanyak 8 orang karyawan atau 12,31 %, usia 21-30 tahun sebanyak 21 orang karyawan atau 31,40 %, usia 31-40 tahun sebanyak 13 orang karyawan atau 20 %, dan usia > 51 tahun sebanyak 9 orang karyawan atau 13,84 %.

Tabel 4.3
Berdasarkan Status Perkawinan

No	Karakteristik	Frekuensi (Karyawan)	Persentase (%)
1	Menikah	34	52,30 %
2	Belum Menikah	31	47,70 %
Total		65	100 %

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa dari 65 orang karyawan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang dilihat dari status perkawinan responden bahwa yang menikah

sebanyak 34 orang karyawan atau 52,30 % dan yang belum menikah sebanyak 31 orang karyawan atau 47,70 %.

Tabel 4.4
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Karakteristik	Frekuensi (Karyawan)	Persentase (%)
1	SMA	5	7,70 %
2	D3	16	24,62 %
3	S1	35	53,84 %
4	S2	9	13,84 %
5	S3	-	-
Total		65	100

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa dari 65 orang karyawan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang di lihat dari tingkat pendidikan responden bahwa yang pendidikan SMA sebanyak 5 orang karyawan atau 7,70 %, D3 sebanyak 16 orang karyawan atau 24,62 %, S1 sebanyak 35 orang karyawan atau 53,84 %, S2 sebanyak 9 orang karyawan atau 13,84 %.

Tabel 4.5
Berdasarkan Pendapatan Perbulan

No	Karakteristik	Frekuensi (Karyawan)	Persentase (%)
1	Rp. 1.000.000,- 2.999.000,-	14	21,53 %
2	Rp. 3.000.000,- 4.999.000,-	31	47,70 %
3	Rp. 5.000.000,- 6.999.000,-	16	24,61 %
4	Rp. > Rp.7.000.000,-	4	6,16 %
Total		65	100 %

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa dari 65 orang karyawan pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang di lihat dari pendapatan perbulan responden bahwa yang pendapatan

perbulan Rp. 1.000.000,- 2.999.000,- sebanyak 14 orang karyawan atau 21,53 %, Rp. 3.000.000,- 4.999.000,- sebanyak 31 orang karyawan atau 47,70 %, Rp. 5.000.000,- 6.999.000,- sebanyak 16 orang karyawan atau 24,61 %, dan pendapatan Rp. > Rp.7.000.000,- sebanyak 4 Orang Karyawan atau 6,16 %.

4.2.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun fungsi deskripsi data adalah untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi (tingkat penyimpangan penyebaran data dari masing-masing variabel), dan jumlah data yang dianalisis. Tabel 4.6 menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	65	2.20	5.00	4.0492	.62753
Pengawasan	65	2.00	4.80	3.6923	.68472
Pemahaman SAK	65	2.00	4.67	3.6102	.66077
Pengelolaan Keuangan	65	2.00	4.80	3.5569	.71719
Valid N (listwise)	65				

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa untuk variabel perilaku kinerja keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,04 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2,20 dan 5,00 serta nilai standar deviasi sebesar 0,627. Untuk variabel pengawasan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,69 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2,00 dan 4,80 serta nilai standar deviasi sebesar 0,684. Untuk variabel pemahaman SAK memiliki nilai rata-rata sebesar 3,61 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2,00 dan 4,67 serta nilai standar deviasi sebesar 0,660. Untuk variabel pengelolaan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,55 dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2,00 dan 4,80 serta nilai standar deviasi sebesar 0,717.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson correlation*. Pertanyaan dinyatakan valid jika nilai r hitung $>$ r table atau nilai p -value lebih kecil dari α 5%. Hasil mengenai uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	r-hitung	P-value	Keterangan
Y1	0,779	0,000	Valid
Y2	0,658	0,000	Valid
Y3	0,771	0,000	Valid
Y4	0,814	0,000	Valid
Y5	0,825	0,000	Valid
X11	0,794	0,000	Valid
X12	0,814	0,000	Valid
X13	0,846	0,000	Valid
X14	0,857	0,000	Valid
X15	0,758	0,000	Valid
X21	0,859	0,000	Valid
X22	0,922	0,000	Valid
X23	0,868	0,000	Valid
X31	0,707	0,000	Valid
X32	0,820	0,000	Valid
X33	0,867	0,000	Valid
X34	0,838	0,000	Valid
X35	0,813	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari masing-masing variabel dinyatakan valid karena memiliki hubungan yang positif terhadap total skor konstruk. Hubungan positif ini terjadi karena masing-masing pernyataan memiliki nilai signifikansi dibawah α 5% dan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.

4.3.2 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidak suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *cronbach alpha*. Kriteria yang digunakan adalah:

- Jika nilai *cronbach alpha* > 0,60 maka pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah reliabel.
- Jika nilai *cronbach alpha* < 0,60 maka pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah tidak reliabel.

Hasil mengenai uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kritis Cronbach Alpha	Keterangan
Kinerja Keuangan (Y)	0,828	0,600	Reliabel
Pengawasan (X1)	0,870	0,600	Reliabel
Pemahaman SAK (X2)	0,858	0,600	Reliabel
Pengelolaan Keuangan (X3)	0,866	0,600	Reliabel

Sumber : Data Diolah (2019)

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menghasilkan nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel > 0.60, sehingga seluruh variabel yang digunakan dinyatakan reliabel.

1.4 Pengujian Asumsi Klasik

1.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. Hasil pengujian *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36958283
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.710

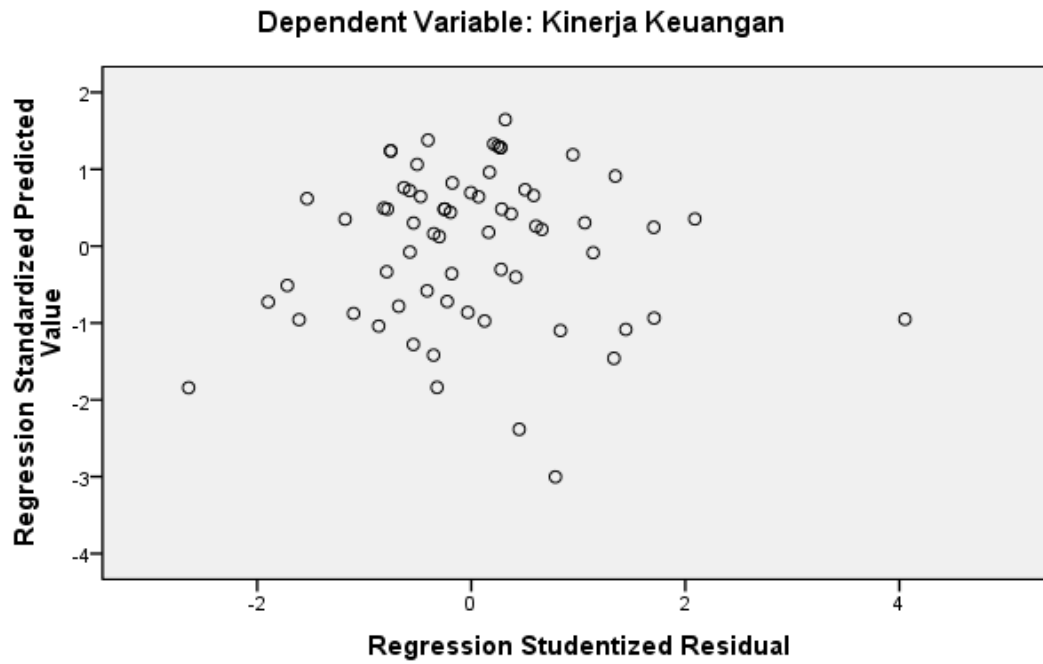
Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,710 > 0,05$ yang berarti bahwa sebaran data berdistribusi normal.

1.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi penelitian yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.1
Pengujian Heterokesdastisitas

Berdasarkan pengujian reliablilitas pada gambar 4.1, terlihat bahwa plot amatan terhadap residual menyebar acak sehingga asumsi bahwa varians galat homogenya terpenuhi atau tidak terjadi heterokedestisitas.

1.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai

VIF. Jika nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance < 1$ maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil perhitungan data diperoleh nilai VIF sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengawasan (X1)	0,621	1,609	Tidak terjadi gejala multikolonieritas
Pemahaman SAK (X2)	0,604	1,655	Tidak terjadi gejala multikolonieritas
Pengelolaan Keuangan (X3)	0,864	1,157	Tidak terjadi gejala multikolonieritas

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan *Tolerance* kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas yaitu korelasi antar variabel bebas.

1.5 Pengujian Hipotesis

1.5.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama variabel-variabel pengawasan, pemahaman SAK, dan pengelolaan keuangan terhadap variabel kinerja keuangan. Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	16.461	3	5.487	38.287	.000 ^a
Residual	8.742	61	.143		

Total	25.202	64		
-------	--------	----	--	--

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan (SAK), dan pengelolaan keuangan terhadap variabel kinerja keuangan. Hal ini didapat karena nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk melihat besar pengaruh secara simultan disajikan pata Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 ^a	.653	.636	.37856

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai *R-Square* sebesar 0,653 atau 65,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengawasan, pemahaman SAK, dan pengelolaan keuangan mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan sebesar 65,3%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

1.5.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel-variabel pengawasan, pemahaman system akuntansi keuangan (SAK), dan pengelolaan keuangan terhadap variabel kinerja keuangan. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.639	.322		1.982	.052

Pengawasan	.255	.088	.279	2.913	.005
Pemahaman SAK	.336	.092	.354	3.649	.001
Pengelolaan Keuangan	.353	.071	.403	4.968	.000

Sumber : Data Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.13, maka model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,639 + 0,255X_1 + 0,336X_2 + 0,353X_3$$

Hasil regresi pada Tabel 4.13 menunjukkan besar pengaruh langsung dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun interpretasi dari model regresi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Koefisien regresi dari variabel pengawasan adalah sebesar 0,255, angka ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat.
2. Koefisien regresi dari variabel pemahaman SAK adalah sebesar 0,336, angka ini menunjukkan bahwa apabila pemahaman SAK meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat.
3. Koefisien regresi dari variabel pengelolaan keuangan adalah sebesar 0,353, angka ini menunjukkan bahwa apabila pengelolaan keuangan meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat.

Berdasarkan Tabel 4.13 maka diperoleh hasil uji hipotesis persamaan. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

a. Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama digunakan untuk menguji pengaruh variabel pengawasan terhadap kinerja keuangan. Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kesimpulan ini didapat dari nilai signifikansi pada Tabel 4.13 sebesar 0,005 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

b. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua digunakan untuk menguji pengaruh variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan (SAK) terhadap kinerja keuangan. Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan (SAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kesimpulan ini didapat dari nilai signifikansi pada Tabel 4.13 sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

c. Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga digunakan untuk menguji pengaruh variabel pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan. Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kesimpulan ini didapat dari nilai signifikansi pada Tabel 4.13 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05.

1.6 Pembahasan Hasil Penelitian

1.6.1 Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kesimpulan ini didapat dari nilai signifikansi pada Tabel 4.13 sebesar 0,005 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Koefisien regresi dari variabel pengawasan adalah sebesar 0,255, angka ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjar (2017) yang juga dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

1.6.2 Pengaruh Pemahaman SAK Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel pemahaman SAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kesimpulan ini didapat dari nilai signifikansi pada Tabel 4.13 sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Koefisien regresi dari variabel pemahaman SAK adalah sebesar 0,336, angka ini menunjukkan bahwa apabila pemahaman SAK meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukmin (2015) yang juga dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

1.6.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari pengujian hipotesis ini adalah variabel pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kesimpulan ini didapat dari nilai signifikansi pada Tabel 4.13 sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Koefisien regresi dari variabel pengelolaan keuangan adalah sebesar 0,353, angka ini menunjukkan bahwa apabila pengelolaan keuangan meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2015) yang juga dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kepuasan dan dampaknya terhadap kinerja. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan, pemahaman system akuntansi keuangan (SAK), dan pengelolaan keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Pengawasan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3. Pemahaman SAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
4. Pengelolaan Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Sosial Provinsi Aceh diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja keuangan.
2. Pegawai Dinas Sosial Aceh aar dapat meningkatkan pemahaman tentang SAK agar dapat meningkatkan kinerja keuangan
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk meningkatkan pemahaman sistem akuntansi keuangan dapat berjalan dengan baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah diteliti ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta: Rineka Cipta
- Baridwan, Zaki. 2013. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta. BPFE.
- Darise, Nurlan. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Resiko (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, Sofyan S. 2013. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harimurti, fadjar. 2017. *Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey Pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar) Eksplorasi Volume XXIX No.2 - Februari Tahun 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi aksara.
- Hutajulu, Halomoan. 2014. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerahdi Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume XVII. Nomor.1. Fakultas Ekonomi, Universitas Cenderawasih
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama.

- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta
- Maringan. 2012. Dasar-Dasar Dan Administrasi Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathis, Robert dan John, Jackson. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukmin. 2015. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara Volume 4, No. 2, Mei 2015 Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Informasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Fauzi Ardy. 2013. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan kerja Pemerintah Daerah (Studi kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Surakarta. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rivai, Veitzal. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Trisnawati Dan Saefullah. 2014. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengawasan.

Wirawan. 2013. Evaluasi Kinerja Sumber Daya manusia. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Yusmalizar. 2014. Pengaruh Pengawasan Intern Dan pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatra Barat). Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Vol 02 hal.23-24.